

Studi Orientasi Ideologi Marhaenisme Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI-P) Provinsi Jawa Tengah

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang studi orientasi ideologi marhaenisme DPD PDI-P Jawa Tengah. Kajian mengenai hal tersebut dilakukan karena ideologi seringkali tidak dijadikan pedoman dalam pembuatan kebijakan, ideologi masih dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya abstrak. Akibatnya kebijakan internal maupun eksternal sering bersifat normatif dan bukan penurunan dari nilai-nilai ideologi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan instrumen wawancara dan telaah dokumen dalam pengumpulan data. Temuan penelitian yang diperoleh adalah ideologi sebagai dasar perjuangan terbukti diterapkan dalam konsep kerja organisasi di DPD PDI-P Jawa Tengah. Namun orientasi kognitif yang dimiliki kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah menyajikan realitas bahwa pemahaman marhaenisme sebagai dasar perjuangan hanya dalam tataran informatif belum pada pelibatan perasaan dan kombinasi nilai dalam tindakan. Akibatnya hambatan datang dari kurangnya pemahaman secara konseptual dan praksis tentang marhaenisme sehingga materialisasi nilai ideologis yang telah terkonsep dalam kerja organisasi di DPD PDI-P Jawa Tengah tidak berjalan.

Kata Kunci: Ideologi, Marhaenisme, Orientasi Ideologi,

Study of the Orientation Ideology Marhaenism in DPD (Provincial Party Administrators) PDI-P (Indonesian Democratic Struggle Party) Central Java

Abstract

This research explains the Study of the Orientation Ideology Marhaenism in DPD (Provincial Party Administrators) PDI-P (Indonesian Democratic Struggle Party) Central Java. The study was carried out because ideology is often not used as a guideline in policy making, ideology is still seen as something abstract. As a result internal and external policies are often normative rather than a decrease in ideological values. This study uses qualitative methods with interview instruments and document review in data collection. The research findings obtained were ideology as the basis of the struggle proved to be applied in the concept of work of the organization in the DPD (Provincial Party Administrators) PDI-P (Indonesian Democratic Struggle Party) Central Java. But the cognitive orientation possessed by cadres and members of the DPD (Provincial Party Administrators) PDI-P (Indonesian Democratic Struggle Party) Central Java presents the reality that the understanding of marhaenism as the basis of struggle is only in the informative level yet in the involvement of feelings and combination of values in action. As a result the obstacles come from a lack of conceptual understanding and praxis about marhaenism so that the materialization of ideological values that have been conceptualized in the work of the organization in the Central Java PDI-P DPD does not work.

Key Word: Ideology, Marhaenism, Ideological Orientation.

A. Pendahuluan

Permasalahan terkait ideologi partai politik yang sering terjadi adalah seringkali ideologi tersebut tidak dijadikan pedoman dalam pembuatan kebijakan. Ideologi masih dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya abstrak. Akibatnya kebijakan internal maupun eksternal partai sering bersifat normatif dan bukan penurunan dari nilai-nilai ideologi. Terlebih jika melihat Indonesia sebagai negara dengan sistem multipartai, dimana dalam sistem multi partai, suara partai politik yang didapat di parlemen sulit memenuhi angka 50%+1. Akibatnya partai membutuhkan koalisi dalam parlemen guna memperkuat kedudukan apakah menjadi partai pendukung pemerintah atau partai oposisi. Namun koalisi yang terbentuk memperlihatkan bahwa partai politik dengan ideologi nasionalis berkoalisi dengan partai politik yang berideologi islamis, bahkan tanpa ragu berkoalisi dengan partai politik yang tidak memiliki ideologi sekalipun. Fenomena ini merupakan gambaran tentang hilangnya batas ideologi dalam peta koalisi partai politik.

Permasalahan lain mengenai ideologi partai adalah menyangkut lemahnya fungsi ideologi dalam kerja partai. Fungsi ideologi sebagai penarik basis masa atau dalam sistem perwakilan dikenal sebagai jembatan antara wakil dan konstituennya tidak optimal. Ideologi politik dituntut untuk menyesuaikan diri terhadap setiap perkembangan zaman, hal tersebut berkaitan dengan materialisasi ideologi. Konteks ruang dan waktu yang kurang diperhatikan dalam upaya mematerialisasikan ideologi

membuat langkah yang ditempuh partai politik sering bias dalam tujuan dan tidak tepat sasaran.

Penelitian ini akan melihat orientasi ideologi marhaenisme DPD PDI-P Jawa Tengah dalam menjalankan roda organisasi partai. Pemilihan Provinsi Jawa Tengah sebagai lokasi penelitian adalah karena Provinsi Jawa Tengah dijuluki sebagai *Kandang Banteng* lantaran PDI-P merupakan partai yang memiliki banyak pendukung didalamnya. Besarnya dukungan ini terlihat dari hasil tiga kali pelaksanaan Pemilu langsung yakni tahun 2004, 2009 dan 2014 dimana PDI-P Jawa Tengah selalu memperoleh kursi terbanyak di parlemen Jawa Tengah. Selain itu, dapat pula dilihat dari perolehan kursi secara nasional, dimana Jawa Tengah merupakan provinsi dengan perolehan suara PDI-P terbanyak di Indonesia.

PDI-P sebagai partai Sukarnoisme memiliki tugas sejarah memperjuangkan penegakan keadilan sosial ke arah kerja-kerja konkret untuk senantiasa merevitalisasi dan mereaktualisasi marhaenisme sebagai ideologi integratif dan transformatif, hal tersebut dapat dilihat melalui kerja-kerja kongkret kader maupun anggota partai. Jawa Tengah dengan julukan *kandang banteng* sebagai satu provinsi yang dapat menggambarkan tentang pelaksanaan penerapan ideologi PDI-P yang mengusung marhaenisme sebagai dasar perjuangan.

Tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan marhaenisme di DPD PDI-P Jawa Tengah, mengetahui pemahaman kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah tentang marhaenisme sebagai

dasar perjuangan serta untuk mengetahui hambatan penerapan marhaenisme di DPD PDI-P Jawa Tengah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode ini digunakan untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji dari pada rincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, tipe penelitian tersebut diartikan sebagai sebuah penelitian yang berusaha mendeskripsikan sesuatu fenomena atau peristiwa secara sistematis dan apa adanya. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini. Sedangkan pemahaman deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Penelitian ini bertempat di DPD PDI-P Jawa Tengah dengan penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang diperoleh dari teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan telaah dokumen.

C. Kerangka Pemikiran Teoritis

I. Orientasi Ideologi

Orientasi merupakan pandangan yang mendasari pemikiran seseorang. Orientasi membentuk sistem berfikir orang terkait suatu hal. Penelitian ini akan melihat pemahaman kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah tentang marhaenisme sebagai dasar perjuangan. Pemahaman tersebut ditinjau dari orientasi yang dimiliki kader dan anggota yang meliputi orientasi kognitif, orientasi afektif dan orientasi evaluatif.

- a. Orientasi Kognitif, yaitu pengetahuan dan kepercayaan terhadap objek-objek politik yang ada di sekitarnya. Individu dalam komunitas sosial hanya sekedar mengenal simbol-simbol politik, pengetahuan mendasar tentang kepercayaan politik, peranan-peranan politik, pemegang peranan politik tersebut dan segala kewajibannya serta input-input dalam sistem politik dan outputnya. Individu memiliki pengetahuan mengenai bagaimana sistem politik bekerja, tokoh-tokoh politik yang memiliki peranan kuat, masalah-masalah politik, kebijakan terkini, dan sebagainya.
- b. Orientasi Afektif, yaitu berbicara mengenai perasaan dan kedekatan individu terhadap suatu sistem politik. Dalam bersikap politik, individu memiliki perasaan mendalam terhadap sistem politik, peranannya, dan aktor politiknya. Apabila individu tersebut memilih simbol parpol sebagai sesuatu yang pasti dan disebabkan oleh pengetahuannya akan simbol-simbol tersebut, maka individu tersebut menggunakan orientasi afektif.

Orientasi afektif memiliki intensitas dan loyalitas yang berbeda yang disebabkan oleh dinamika psikologis individu, seperti kemarahan, rasa benci, rasa bangga, senang maupun frustrasi. Perasaan kecewa akibat tersingkirkan ataupun mengalami penolakan terhadap sistem politik yang ada dapat mengakibatkan individu enggan menanggapi sistem politik yang ada. Demikian pula sebaliknya, pengalaman yang menyenangkan akan mengakibatkan individu terlibat dalam sistem politik yang ada.

- c. Orientasi Evaluatif, yaitu keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Individu memahami betul program dan perjuangan partai. Ia juga simpatik dengan ketokohan simbolik partai, yang dengan demikian menyebabkan terlihat aktif dalam perjuangan program partai.

II. Ideologi

Ideologi bukan hanya sekedar gagasan, melainkan gagasan yang diikuti dan dianut sekelompok manusia maupun bangsa, sehingga ideologi bersifat menggerakkan manusia untuk merealisasikan gagasan tersebut. Meskipun gagasan seseorang, betapapun ilmiah, rasional atau luhurnya, belum bisa disebut ideologi apabila belum dianut oleh banyak orang dan diperjuangkan serta diwujudkan dengan aksi-aksi yang

berkesinambungan. Ideologi memiliki fungsi menanamkan keyakinan atau kebenaran perjuangan kelompok atau kesatuan yang berpegang teguh pada ideologi itu sendiri. Maka ideologi merupakan sumber inspirasi dan sumber cita-cita hidup bagi para penganutnya. Ideologi sebagai pedoman artinya menjadi pola dan norma hidup tetapi sekaligus menjadi ideal atau cita-cita. Dengan melaksanakan ideologi manusia tidak hanya sekedar melakukan apa yang disadari sebagai kewajiban, tetapi dengan ideologi pula manusia mengejar keluhuran. Oleh karena itu, manusia sanggup mengorbankan harta benda bahkan hidupnya demi ideologi, karena ideologi menjadi pola, norma hidup dan dikejar pelaksanaannya sebagai cita-cita maka tidak mengherankan jika ideologi menjadi bentuk hidup.

III. Marhaenisme

Marhaenisme dapat dikatakan sebagai sebuah ideologi karena telah memenuhi kaidah-kaidah ideologi yang disebutkan pada penjelasan konseptual mengenai ideologi. Marhaenisme merupakan gagasan yang lahir dari pemikiran Sukarno kemudian dianut dan diyakini sekelompok manusia yakni bangsa Indonesia. Gagasan mengenai marhaenisme merupakan intisari dari ideologi bangsa yakni Pancasila 1 Juni 1945. Dimana lima butir Pancasila sebagai dasar negara jika diperas kembali menjadi tiga butir dasar negara yakni Sosio-Nasionalisme yang mencangkup butir kebangsaan dan internasionalisme, Sosio-Demokrasi yang mencangkup butir musyawarah mufakat dan keadilan social serta Ketuhanan YME. Yang mencangkup butir sila Ketuhanan.

Lebih spesifik lagi tiga rumusan tersebut dapat diperas kedalam satu rumusan yakni Gotong Royong. Konsep tersebut merupakan konsep mengenai ideologi marhaenisme.

Marhaenisme juga dikatakan sebagai sebuah ideologi karena memiliki nilai, norma dan kepercayaan. Dimana nilai yang terkandung adalah apa yang diharapkan tentang masyarakat terbebas dari belenggu penindasan baik oleh bangsa asing maupun oleh bangsa sendiri. Norma sendiri terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan menjadi benteng masyarakat dalam bertindak agar cita-cita orang-orang yang memegang teguh marhaenisme tersebut dapat terealisasikan. Kepercayaan dalam hal ideologi marhaenisme yakni menanamkan keyakinan dan kebenaran tentang perjuangan kelompok yang berpegang pada marhaenisme dapat mewujudkan cita-cita ideologi tersebut.

IV. Ideologi Partai Politik

Ideologi partai politik merupakan payung organisasi partai politik secara keseluruhan termasuk perilaku-perilaku yang muncul didalamnya. Kekuatan ideologi suatu partai politik dapat juga diukur melalui kejelasan persepsi masyarakat akan nilai dan faham yang menjadi basis perjuangan partai politik yang bersangkutan. Ketika pemahaman masyarakat tinggi akan identitas dan basis perjuangan suatu partai politik, maka dapat dikatakan bahwa ideologi partai politik tersebut kuat. Namun apabila masyarakat hanya mampu melihat ideologi suatu partai politik dengan samar-samar

dan bahkan bingung dalam mengidentifikasi maksud dan tujuan pendirian partai politik tersebut, maka ideologi partai politik tersebut dapat dikatakan lemah.

Mengingat partai politik merupakan sebuah organisasi maka ideologi partai politik menjadi baik dan kuat jika terdapat konsistensi yang tinggi dari segala elemen organisasi dalam menegakannya. Adapun elemen organisasi penyusun ideologi partai politik tersebut adalah visi dan misi partai, tujuan antara, strategi partai, struktur organisasi partai, budaya organisasi partai, kebijakan partai, kolektivitas ideologi politik, dari ideologi individu ke organisasi, dari sejarah pembentukan ke perkembangan, dari kebijakan internal ke eksternalisasi, materialisme ideologi politik, *platform* partai, isu politik dan kerangka acuan *problem solving*.

Elemen-elemen penyusun ideologi politik tersebut dapat ditinjau dari fungsi partai politik itu sendiri sebagai suatu organisasi. Adapun fungsi partai politik itu adalah (1) sebagai sarana komunikasi politik (*instrument of political communication*), (2) sebagai sarana sosialisasi politik (*instrument of political socialization*), (3) sebagai sarana rekrutmen politik (*instrument of political recruitment*) dan (4) sebagai sarana pengatur konflik (*instrument of conflict management*).

D. Pembahasan

I. Penerapan Marhaenisme di DPD PDI-P Jawa Tengah

Analisis penerapan marhaenisme di DPD PDI-P Jawa Tengah dengan melihat konsep ideologi marhaenisme melalui fungsi partai politik menurut Miriam Budiardjo yang meliputi komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan sarana pengatur konflik yang dijalankan DPD PDI-P Jawa Tengah.

Nilai marhaenisme telah ada dalam setiap konsep gerak DPD PDI-P Jawa Tengah yang dapat dilihat dari fungsi partai politik menurut Miriam Budiardjo. Nilai marhaenisme terdapat dalam setiap fungsi partai politik yang dijalankan oleh DPD PDI-P Jawa Tengah meliputi komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan sarana pengatur konflik. Tinjauan melalui komunikasi politik yang dilakukan di DPD PDI-P Jawa Tengah memperlihatkan bahwa dalam menjalankan fungsi aspirasi, agregasi dan artikulasi, hal yang berkaitan dengan kepentingan *wong cilik* menempati skala prioritas pertama untuk kemudian diperjuangkan kader dan anggota yang duduk di parlemen Jawa Tengah sebagai suatu bentuk usaha materialisasi ideologi. Konsep tersebut juga diterapkan dalam hal pengaturan konflik yang dijalankan DPD PDI-P Jawa Tengah. Proses sosialisasi politik yang dilakukan DPD PDI-P Jawa Tengah fokus pada upaya penanaman nilai-nilai yang menjadi dasar perjuangan partai, masif dilakukan dalam Komunitas Juang Jawa Tengah sebagai sayap partai. Rekrutmen internal yang dilakukan DPD PDI-P Jawa Tengah dalam pemilihan ketua

mengedepankan musyawarah mufakat disetiap pengambilan keputusan. Hal tersebut sebagai upaya penerapan nilai marhaenisme dalam prinsip sosio-demokrasi.

II. Pemahaman Kader dan Anggota DPD PDI-P Jawa Tengah tentang Marhaenisme sebagai Dasar Perjuangan

Pemahaman tentang marhaenisme sebagai dasar perjuangan dimiliki oleh setiap kader dan anggota, dimana masing-masing dari mereka menyadari bahwa nilai marhaenisme merupakan acuan partai menentukan langkah gerak dalam usaha pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. Hal tersebut menjelaskan tentang orientasi kognitif kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah Masing-masing kader dan anggota di DPD PDI-P Jawa Tengah memahami bahwa asas partai yang tercantum dalam AD/ART adalah Pancasila 1 Juni 1945 dengan nilai marhaenisme sebagai intisari dari lima prinsip pokok dalam Pancasila 1 Juni 1945. Intisari tersebut termuat dalam prinsip marhaensime yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan Ketuhanan YME.

Orientasi afektif berkaitan dengan perasaan serta sikap kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah terhadap marhaenisme sebagai dasar perjuangan. Kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah meyakini dan mendukung upaya pencapaian tujuan partai dengan menggunakan marhaenisme sebagai dasar perjuangan. Namun dukungan tersebut diwujudkan kader dan anggota dalam bentuk mematuhi perintah ketua DPD

PDI-P Jawa Tengah. Hal tersebut dilakukan karena mereka meyakini bahwa apapun yang diperintahkan adalah berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam dasar perjuangan partai.

Bentuk dukungan kader dan anggota terhadap marhaenisme sebagai dasar perjuangan tercermin dalam kepatuhan pada segala perintah ketua DPD PDI-P Jawa Tengah. Hal tersebut membuktikan bahwa sebenarnya ikatan emosional yang terbentuk adalah antara kader dan anggota dengan pimpinanya bukan dengan marhaenisme sebagai dasar perjuangan. Hal yang penting untuk digaris bawahi adalah kader dan anggota memiliki pengetahuan tentang marhaenisme sebagai dasar perjuangan hanya saja ikatan emosional yang terbentuk dalam konteks kerja struktural organisasi di DPD PDI-P Jawa Tengah dimana mereka mematuhi segala perintah ketua.

Orientasi evaluatif berkaitan dengan keputusan dan pendapat tentang marhaenisme sebagai dasar perjuangan dengan melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Orientasi evaluatif berbicara tentang individu yang memahami betul dasar perjuangan partai, mengetahui tindakan dalam konteks materialisasi nilai-nilai perjuangan, mengetahui konteks ruang dan waktu dalam materialisasi nilai perjuangan sehingga yang demikian menyebabkan individu tersebut terlihat aktif dalam perjuangan partai.

Kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah hanya sebatas mengetahui bahwa nilai marhaenisme menjadi dasar perjuangan partai. Nilai marhaenisme yang mengalir dalam setiap gerak partai untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang dikenal

dengan Trisakti Bung Karno tidak diimbangi dengan wujud kongkret nilai tersebut dalam suatu tindakan dari masing-masing kader dan anggota.

Tinjauan melalui orientasi kognitif, afektif dan evaluatif dalam melihat pemahaman kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah, memperoleh hasil bahwa orientasi kognitif yang banyak berperan dalam menggambarkan realitas pemahaman kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah. Orientasi kognitif berkaitan dengan pengetahuan kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah tentang marhaenisme sebagai dasar perjuangan. Orientasi tersebut sifatnya hanya pemahaman informatif belum pada tahap pelibatan perasaan dan kombinasi nilai marhaensime dalam tindakan. Akibatnya, materialisasi nilai marhaensime yang telah terkonsep dalam fungsi partai politik yang dijalankan DPD PDI-P Jawa Tengah tidak berjalan.

III. Hambatan dalam Penerapan Marhaenisme di DPD PDI-P Jawa Tengah

Hambatan dalam penerapan marhaensime di DPD PDI-P Jawa Tengah adalah kurangnya pemahaman kader dan anggota tentang marhaenisme baik secara konseptual maupun praksis. Hal tersebut merupakan efek dari orientasi ideologi yang dimiliki kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah.

Kemampuan kader maupun anggota PDI-P Jawa Tengah dalam mengidentifikasi tindakan-tindakan ideologis yang sesuai dengan perkembangan zaman masih sangat minim, usaha untuk meningkatkan kemampuan tersebut sangat

tinggi melalui Pendidikan dan pelatihan ideologi namun terhambat lantaran keterbatasan, salah satunya adalah keterbatasan dana dalam pelaksanaannya.

Anggota maupun kader PDI-P Jawa Tengah baik yang ada di jabatan pemerintahan maupun yang tidak rata-rata hanya memahami apa yang menjadi instruksi ketua DPD PDI-P Jawa Tengah tanpa memahami secara mendalam konteks ideologi yang terkandung di dalamnya untuk kemudian diperjuangkan. Sehingga usaha dalam mematerialiskan ideologi partai ke dalam kebijakan pemerintahan Jawa Tengah perlu proses yang ekstra. Karena partai harus menyelesaikan terlebih dahulu persoalan pemahaman anggota fraksi yang minim dalam aspek ideologi dan mereka cenderung hanya berfokus pada pragmatisme politik.

Menurut penjelasan dari ketua DPD PDI-P Jawa Tengah, perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang cepat merupakan tantangan tersendiri bagi partai. tantangan datang ketika usaha untuk mematerialkan ideologi harus selalu diupayakan agar sesuai konteks ruang dan waktu yang ada. Sementara itu para kader dan anggota bahkan belum selesai dalam memahami ideologi partai dalam hal konseptual sehingga usaha pencapaian cita-cita perjuangan dinilai semakin berat dan membutuhkan usaha lebih.

E. Kesimpulan

Ideologi sebagai dasar perjuangan terbukti diterapkan dalam konsep kerja organisasi di DPD PDI-P Jawa Tengah. Namun orientasi kognitif yang dimiliki kader dan anggota DPD PDI-P Jawa Tengah menyajikan realitas bahwa pemahaman marhaenisme sebagai dasar perjuangan hanya dalam tataran informatif belum pada pelibatan perasaan dan kombinasi nilai dalam tindakan. Akibatnya hambatan datang dari kurangnya pemahaman secara konseptual dan praksis tentang marhaenisme sehingga materialisasi nilai ideologis yang telah terkandung dalam kerja organisasi di DPD PDI-P Jawa Tengah tidak berjalan.

F. Saran

Berdasarkan penyajian data, pembahasan serta kesimpulan yang penulis dapat dari penelitian dengan judul Studi Orientasi Marhaenisme DPD PDI-P Jawa Tengah ini maka terdapat saran yang penulis sampaikan, antara lain sebagai berikut:

a. Peningkatan pemahaman kader dan anggota melalui kaderisasi berkesinambungan

Selama ini kaderisasi yang dilakukan dalam DPD PDI-P Jawa Tengah sebatas terprogram dan berjenjang, diantaranya melalui kursus kader. Hal yang perlu difahami bahwasanya kaderisasi tidak cukup dalam konsep terprogram dan berjenjang, harus adanya kaderisasi berkesinambungan. Tujuannya adalah

bahwa setelah penanaman nilai dapat dilakukan pada kader dan anggota maka perlu adanya pengembangan jaringan kerja ke komponen-komponen masyarakat agar lebih mendekatkan diri terutama pada *wong cilik*. Kaderisasi berkesinambungan menugaskan para kadernya untuk ditempatkan dalam jaringan kemasyarakatan yang dibangun sebagai cara dan pola rekrutmen untuk melahirkan para pemimpin partai yang berkualitas dan berpihak pada rakyat kecil. Maka para aktivis partai yang sudah mengikuti Pendidikan kader harus memiliki pengalaman lebih bersama masyarakat, sebagai contoh melalui organisasi pemuda, petani, buruh dan lain sebagainya sebelum diajukan partai untuk penugasan di Lembaga eksekutif maupun legislatif.

b. Alokasi dana untuk proses kaderisasi dan penanaman nilai ideologi

Perlu adanya peningkatan alokasi dana bagi proses kaderisasi dan penanaman nilai ideologi partai agar proses tersebut lebih bisa dimaksimalkan. Dalam hal ini DPD PDI-P Jawa Tengah harus lebih mengaktifkan iuran pengurus agar memiliki keterikatan tanggungjawabnya kepada partai terutama pada kader dan anggota di Jawa Tengah serta agar tidak selalu mengandalkan dana dari kalangan atas.

c. Materialisme ideologi sesuai konteks ruang dan waktu

Kondisi di luar partai seperti perubahan dalam masyarakat, kemajuan teknologi maupun globalisasi mengharuskan DPD PDI-P Jawa Tengah menempuh langkah-langkah adaptasi dengan cepat. Mengingat bahwa dunia politik tidak terbatas pada Pemilu, parlemen ataupun kekuasaan semata. Tetapi

perlu juga diperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, Pendidikan, kesejahteraan sosial serta teknologi agar partai politik dapat masuk ke ruang-ruang berbangsa dan bernegara dengan optimal. Maka dari itu ideologi partai politik harus mampu menyesuaikan diri terhadap setiap perkembangan zaman yang ada. Atribut-atribut ideologi partai politik seperti kebijakan, strategi partai, isu politik, budaya organisasi dan lain sebagainya dituntut untuk terus beradaptasi dengan perubahan yang ada dalam masyarakat agar penyelesaian masalah yang ada menjadi tepat dan optimal.